

## DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid, S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I s/d Pelita IV), Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan Dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Universitas Indonesia, September 1993.
- , *Materi Muatan Undang-Undang Indonesia*, Makalah Seminar Pengajar HTN, Juli 1993, FH Ubaya, Surabaya.
- Allot, Antony, *The Limits of Law*, Butterworths, London, 1980.
- Biezeveld, G. A., *Syllabus of Course on Environmental Law Enforcement in the Netherlands*, Kerjasama Indonesia-Belanda, FH Unair., Surabaya, 1995.
- Basah, Syachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- , *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Bruggink, J. J. H., *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan dari Rechts Reflecties, oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Cohen, Morris L., *Penelitian Ilmu Hukum: Sinopsis*, disunting oleh Ibrahim, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Prentice Hall International Inc., London, 1978.
- Drupsteen, Th. G., *EMA and Further Legislation*, Leyden University, the Netherlands, Makalah Lokakarya, Surabaya, 1994.
- Expert Group on Environmental Law of the WCED, *Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendation*, Graham and Trotman/ Martinus Nijhoff, London, 1986.

- Faure, M. G. et al., *Kekhawatiran Masa Kini*, terjemahan dari Zorgen Van Heden, oleh Tristam P. Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Gündling, Lothar, *Trends in Environmental Policy and Law : Public Participation*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980.
- Gore, Alberth, *Bumi Dalam Keseimbangan : Ekologi dan Semangat Manusia*, terjemahan dari Earth in the Balance : Ecology and Human Spirit, oleh Hira Jhamtani, Obor, Jakarta, 1994.
- Gani, Abdoel, *Hukum dan Politik : Beberapa Permasalahan*, dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *Hubungan Antara Politik, Hak Asasi Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Makalah Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Lustrum VIII Unair., Nopember 1994, Surabaya.
- Hadjon, Philipus Mandiri et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cet. keempat, 1995.
- , *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, FH Unair, Surabaya, 1993.
- , *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Universitas Airlangga, Oktober 1994, Surabaya.
- , *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi*, Makalah Seminar Pengajar HTN, Juli, FH Ubaya., Surabaya, 1993.
- , *Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) dan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah Pelatihan Hakim PTUN, Surabaya, September 1994.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1988.
- , *Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (bestuurshandeling)*, FH Unair, Surabaya, 1987.
- , *Aspek-aspek Hukum Administrasi Dari KTUN: Izin*, Makalah Pelatihan Hakim PTUN, Bandung, 1995.

- , **Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan**, Makalah Seminar Nasional, FH UII, Yogyakarta, 1995.
- , **Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)**, Yuridika, FH Unair, Nopember 1994.
- , **Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Makalah, FH Unair, Surabaya, 1994.
- aryono, **Masalah Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara**, Yuridika, Surabaya, No. 2 Tahun 1990.
- , **Penyempurnaan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum R.I. dan Tata Urutan Perundang-undangan R.I.**, Makalah Seminar Ketatanegaraan, Surabaya, 18 Nopember 1991.
- , **Tantangan Lembaga Peradilan untuk Menegakkan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas**, Makalah Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Lustrum VIII Unair., Nopember 1994, Surabaya.
- ardjasoemantri, Koesnadi, **Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gajah Mada, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- , **Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup**, Pidato Akhir Jabatan Guru Besar Universitas Gajah Mada, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- , **Hukum Tata Lingkungan**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- , **Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- lamzah, A., **Penegakan Hukum Lingkungan**, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995.
- arman, Benny K., **Peranan Advokasi LSM Mewujudkan Gerakan Lingkungan Hidup di Indonesia**, Makalah Up Grading Tenaga Pengelola Media Komunikasi LSM, WALHI-JARIM, Nopember 1990, Jakarta.
- adad, Ismid, **Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat**, Prisma No. 4, April 1983.

- droharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- , *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II: Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- abis, Todung Mulya, *In Search Of Human Rights : Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, 1966-1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- onergan, Bernard, *Dialectic of Authority*, dalam Frederick J. Adelman, *Authority*, Martinus Nijhof, The Hague, 1974.
- Woltgens dan Th. G. Drupsteen, *Hukum Perizinan Lingkungan*, disunting oleh Siti Sundari Rangkuti, Kerjasama Indonesia-Belanda, FH Unair., Surabaya, 1992.
- otulung, Paulus Effendie, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- anan, Bagir, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*, Ditjen. Kumdam. Dep. Kehak., Jakarta, 1995.
- icolai, P., *Beginnselen Van Behoorlijk Bestuur*, Kluwer Deventer, 1990.
- angkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- , *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1987.
- , *Hukum Lingkungan Administratif : Izin*, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, FH Unair, Surabaya, Januari 1994.
- , *Kajian Terhadap Perangkat Hukum Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Majalah Andal No. 7, Jakarta, 1990.

- , *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Airlangga, Mei 1991, Surabaya.
- , *Sarana Hukum Pengendalian Pencemaran Udara*, Pidato Ilmiah Dies Natalis XLI Unair, Surabaya, 1995.
- , *Aspek Hukum Lingkungan Dalam Bisnis*, Makalah Diskusi Nasional, FE Untag, Surabaya, 1994.
- , *Perubahan dan Penyempurnaan UULH*, Makalah Lokakarya, FH Unair, Surabaya, 1994.
- , *Beberapa Problematika Hukum Lingkungan*, Makalah Program Pendidikan Konsultasi Hukum dan Kepengacaraan, Kerjasama FH Unair dengan PT Jatim., Surabaya, 1994.
- , dan Drupsteen, Th.G., *Kasus-kasus Hukum Lingkungan*, Kerjasama Indonesia-Belanda FH Unair., Surabaya, 1993.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif*, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, FH Unair, Surabaya, Januari 1995.
- Wijter, D. W. P., *Bestuursrechtelijke Wetgevingsleer*, Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1987.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.
- Widodo, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Widomietro, Rochmat, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Disertasi, Eresco, Jakarta, 1976.
- , *Rancangan Undang-undang Peradilan Administrasi*, Laporan Proyek Survey, BPHN, Jakarta, 1978.
- , *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Widoeokanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1993.
- Widuwoto, *Kekuasaan Dan tanggung Jawab Presiden Indonesia: Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

- , *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Yuridika, Surabaya, Agustus 1990.
- leh, Ismail, *Persetujuan DPR Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Set. Neg., Jakarta, Desember 1986.
- eiger, Heinhard, *Trends in Environmental Policy and Law : The Fundamental Right to a Decent Environment*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980.
- lalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Internasional*, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, Yogyakarta, 1988.
- , *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- ntosa, M. Achmad, *Kecakapan dan Kewenangan LSM (Lingkungan) di Forum Pengadilan*, Makalah Lokakarya Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, 1992.
- , *Perkembangan Hukum Standing Dalam Gugatan Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, September 1995.
- , *Deskripsi Kontroversi Seputar Dana Reboisasi Bagi Pembangunan Pesawat Terbang*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 1994.
- , *Penguatan Institusi Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional, FH UII, Yogyakarta, 1995.
- aidi, Zaim, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM Dan Kebangkitan Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- emartono, R. M. Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- etiawan, Bonnie, *Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat Sipil*, Prisma No. 7 Juli 1996.
- en Berge, J. B. J. M et al., *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus Mandiri Hadjon, Fak. Hukum Unair., Utrecht, 1991.
- ak, P. J. P., *Rechtsvorming in Nederland*, Samson H. D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1987.

- n Buuren, P. J. J., *Kringen van Belanghebbende : In het bijzonder in procedures tegen de overheid*, Kluwer Deventer, 1978.
- n Wijk, H. D. dan Konijnenbelt, W., *Hoofdstukken van Administratief Recht*, vijfde druk, Vuga, s'Gravenhage, 1984.
- toelar, Erna, *Identitas dan Kemandirian Ornop*, Makalah Seminar Peranan LSM/LPSM Dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat, Jakarta, Oktober 1981.
- hyono, Padmo, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- amin, H. Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Prapanca, Jakarta, 1971.
- alkarnaen, M. S., *Peranan LSM Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Makalah Seminar Sistem Hukum Nasional dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, YLBHI-WALHI-LP3ES, Jakarta, Desember 1989.
- ain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

#### edia Masa :

- arian Republika, *Diharapkan Untuk Yang Terakhir Kali: Pinjaman Bunga DR ke IPTN Jadi Modal Pemerintah*, 30 Januari 1997.
- arian Surya, *IPTN Tidak Usah Kembalikan DR Rp. 400 Miliar*, 30 Januari 1997.

#### eraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan :

- ordonansi Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Tahun 1926, Staatsblad 1926 No. 226 Sebagaimana Diubah Terakhirkali dengan Staatsblad 1940 No. 14 dan 450.
- ndang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (LNRI Tahun 1964 No. 107 TLNRI No. 2699)
- ndang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (LNRI Tahun 1970 No. 74 TLNRI No. 2951)

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang **Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah** (LNRI Tahun 1974 No. 38 TLNRI No. 3037)

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang **Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup** (LNRI Tahun 1982 No. 12 TLNRI No. 3215)

Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang **Organisasi Masyarakat** (LNRI Tahun 1985 No. 44 TLNRI No. 3298)

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang **Mahkamah Agung** (LNRI Tahun 1985 No. 73 TLNRI No. 3316)

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** (LNRI Tahun 1986 No. 77 TLNRI No. 3344)

Undang-undang No. 10 Tahun 1990 tentang **Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang** (LNRI Tahun 1990 No. 80 TLNRI No. 3429)

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang **Pengelolaan Lingkungan Hidup** (LNRI Tahun 1997 No. 68 TLNRI No. 3699)

**Igemene Wet Bestuursrecht**, an English translation (General Administrative Law Act), Ministry of Justice, Ministry of Home Affairs, Kingdom of the Netherlands, The Hague, May, 1994.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1976 tentang **Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang** (LNRI Tahun 1976 No. 21)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1989 tentang **Dana Reboisasi**.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang **Dana Reboisasi**.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1990 tentang **Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang**.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1993 tentang **Dana Reboisasi**.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 1994 tentang **Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara**.



Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 1989 tentang *Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi*.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 435/Kpts-II/1989 tentang *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kehutanan*.

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan No. 421/Kpts-II/1990 dan No. 931/KMK.013/1990 tentang *Ketentuan-ketentuan Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman Dari Dana Reboisasi Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri*.

Keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 tentang *Juklak. yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peratun. II, tahun 1991*.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*.

**Keputusan Badan Peradilan :**

Keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 499/K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 tentang *Beban Pembuktian*.

Keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 tentang *Sumpah Sebagai Alat Bukti*.

Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 33 /B/1995/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Juli 1995 tentang *Kasus Dana Reboisasi*.

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 088 /G/1994/Piutang /PTUN.Jkt. tanggal 23 Desember 1994 tentang *Kasus Dana Reboisasi*.

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 053 /G/1995/Ij/PTUN.Jkt. tanggal 30 Oktober 1995 tentang *Kasus Amdal Freeport*.